

Analysis of the Role of the Regional Inspectorate in the Budget Management Review on the Implementation of the Deli Serdang Regency APBD

Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Reviu Pengelolaan Anggaran terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang

Putri Gusniati¹⁾; Nur Rahmadi Bi Rahmani²⁾

^{1,2)} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
Email: ¹⁾ putriqusnia95@gmail.com; ²⁾ nurahmadi@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [19 Mei 2022]
Revised [05 Juni 2022]
Accepted [25 Juni 2022]

KEYWORDS

Deli Serdang, Inspectorat, APBD, Review

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Otonomi daerah membawa angin segar bagi daerah, karena selain mendapatkan kewenangan yang lebih besar juga mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Sumber belanja daerah berasal dari pendapatan asli daerah yang berasal dari transfer dana, pendapatan asli daerah dan lain-lain yang sah. kontribusi pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan dengan tren yang terus menurun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan kawasan perbelanjaan yang semakin meningkat sementara sumber pendapatan asli daerah terbatas. Jika pemerintah tidak mampu mengoptimalkan pendapatan di luar dana perimbangan, maka dapat memperbesar kesenjangan fiskal yang semakin besar. Hal ini sesuai dengan peranan inspektorat dalam melakukan reviu anggaran pelaksanaan APBD di Kabupaten Deli Serdang.

ABSTRACT

Regional autonomy is a breath of fresh air for the region, because it not only gets greater authority but also allocates a larger budget. The source of regional expenditure comes from regional original income from transfer of funds, regional original income and other legal sources. Most regional income donations come from balancing funds with a trend that continues to shrink. The research procedure used is a qualitative research procedure. The method of collecting information used is observation and interviews. The results of the research obtained in an effort to improve the welfare of citizens, regional governments are faced with the need for shopping areas which continues to increase while the original source of income for the region is limited. If the government is not able to maximize income outside the balancing fund, it can enlarge the fiscal gap that continues to be large. This is in line with the role of the inspectorate in carrying out a budget review for the implementation of the APBD in Deli Serdang Regency.

PENDAHULUAN

Era reformasi yang telah berlalu menimbulkan banyak problematika yang muncul dari kebijakan pemerintah yang baru. Beberapa bagian yang mengandung sebuah perubahan tersebut membahas tentang otonomi daerah serta desentralisasi keuangan yang disepakati sejak tanggal 1 Januari 2001. Perubahan mengenai desentralisasi tersebut kemudian diamandemen untuk disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas tentang otonomi daerah pada beberapa wilayah di Indonesia. Implementasi otonomi daerah sector keuangan tersebut akan menjadi landasan utama dalam peertanggungjawaban yang membahas tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penggunaan APBD dalam pemerintahan tersebut akan diukur sebagai indicator satuan moneter yang melibatkan beberapa pihak tertentu sehingga kewenangannya tidak dapat dialokasikan dalam waktu yang singkat. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran tersebut memuat tentang belanja, aktivitas hingga pembiayaan dan pendapatan dalam hitungan satuan moneter.

Dalam pemerintahan, anggaran sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah pada masyarakat untuk memenuhi beberapa elemen penting dari infrastruktur pemerintahan. Landasan dasar penetapan anggaran tersebut didasarkan pada besarnya target serta tarif yang dibutuhkan dan besaran pada kepentingan infrastruktur yang dicapai dalam sebuah problematika pemerintah. Anggaran yang mengacu pada pengawasan ini juga menjadikan kepala daerah sebagai penentu utama arah APBD yang dikelola agar membawa manfaat yang efisien dan efektif. Penggunaan anggaran tersebut akan mengaitkan beberapa pertanggungjawaban pemerintah yang tugasnya memiliki integritas langsung dengan masyarakat yang terlibat. Urgensi APBD bagi sebuah wilayah mengingat hak otonomi daerah telah banyak diterapkan pada masyarakat akan membawa kelebihan tertentu bagi suatu wilayah jika menggunakan anggaran bagi kemaslahatan umat. Pentingnya peranan anggaran dalam setiap daerah sama halnya dengan pentingnya peranan inspektorat sebagai pengawas anggaran di setiap daerah. Oleh

karena itu, inspektorat memiliki keistimewaan jabatan sehingga mampu mengelola anggaran yang dibutuhkan oleh daerah agar sesuai dengan rencana.

LANDASAN TEORI

Undang- Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Wilayah serta Undang- Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Wilayah ialah bawah desentralisasi politik, administrasi serta fiskal dalam rangka mewujudkan Otonomi. UU Nomor. 22 berintikan pembagian wewenang serta guna(power sharing) antara pemerintah pusat serta wilayah. Sebaliknya UU Nomor. 25 mengendalikan tentang pembagian sumber keuangan(financial sharing) antara pusat- daerah selaku konsekuensi dari pembagian kewenangan. Kedua undang- undang tersebut menegaskan kalau pembangunan otonomi wilayah diselenggarakan dengan mencermati prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, keadilan, dan memikirkan kemampuan serta keragaman sumber energi wilayah. Terlebih undang- undang ini pula sudah membagikan arah yang jelas buat dicapai serta membagikan keleluasaan untuk wilayah di luar apa yang terdapat di masa kemudian. Penerapan otonomi wilayah yang efisien dilaksanakan pada bulan Januari 2001 sudah bawa pergantian mendasar dalam penerapan serta pembiayaan pembangunan wilayah di tiap kabupaten/ kota. Pergantian tersebut paling utama nampak di daerah- daerah yang mempunyai sumber energi alam, wilayah yang pendapatannya bertambah sangat besar dibanding saat sebelum masa otonomi.

Keadaan ini bisa terjalin sebab otonomi wilayah sudah membagikan kewenangan yang sangat luas buat mengendalikan tiap bidang pembangunan wilayah serta kewenangan fiskal. Sehingga tiap wilayah mempunyai keleluasaan buat meningkatkan kemampuan pemasukan wilayah di satu sisi, serta keleluasaan buat meningkatkan program serta prioritas pembangunan di sisi lain. Pada penerapan desentralisasi fiskal wajib diatur dalam ikatan keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber energi alam serta sumber energi yang lain yang adil serta tidak berubah- ubah antara pemerintah pusat serta pemerintah wilayah, serta antar pemerintah wilayah. Pemerintah pada hakekatnya mempunyai 3 guna utama, ialah guna distribusi, stabilisasi, serta alokasi. Pemerintah Pusat hendak lebih efisien serta pas dalam melaksanakan guna distribusi serta guna pemantapan, sebaliknya pemerintah wilayah yang lebih mengenali kebutuhan serta kondisi warga setempat hendak lebih efisien serta pas dalam melaksanakan guna alokasi.(UU Nomor. 33 Tahun 2004).

Tetapi bersumber pada hasil riset Frediyanto (2010) menampilkan kalau sehabis otonomi wilayah, kenaikan penerimaan PAD tidak dan merta tingkatan donasi penerimaan dalam anggaran apalagi jumlah wilayah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah bertambah(dari 88, 57% jadi 91, 43%).. Penyusutan harga minyak dunia pula berakibat pada menyusutnya penerimaan wilayah penghasil migas di Indonesia. Dalam RAPBN 2015 diresmikan anggapan ICP sebesar US\$70 per barel. Keadaan ini hendak pengaruhi keahlian wilayah dalam melakukan kewenangan fiskal. Sedangkan itu, sumber pemasukan asli wilayah yang lain, misalnya Pemasukan Asli Wilayah pula dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi wilayah. Bagi Syahelmi(2008) kalau pergantian PDRB hendak merespon pergantian signifikan terhadap PAD. Perlambatan perkembangan ekonomi nasional pula diiringi oleh perlambatan perkembangan ekonomi di sebagian wilayah, paling utama wilayah penghasil migas. Provinsi Riau misalnya, perkembangan ekonominya pada triwulan I 2015 hadapi kontraksi sebesar 0, 18%. Untuk wilayah otonom paling utama penghasil migas, kedudukan penerimaan wilayah jadi mempunyai makna yang sangat berarti sebab sumber penerimaan dari untuk hasil migas hadapi penyusutan. Tetapi, kala kedudukan pemasukan wilayah pula tidak bisa diharapkan, wilayah semacam itu hendak mengalami permasalahan keuangan dalam melaksanakan kewenangan wilayah.

Sepanjang ini ketergantungan wilayah otonom terhadap pemerintah pusat masih lumayan besar. Proporsi penerimaan wilayah terbanyak masih bersumber dari hibah(transfer dana), misalnya pada tahun 2012 sebesar 65, 69% pemasukan wilayah di tingkatan provinsi serta kabupaten/ kota di Indonesia berasal dari dana perimbangan berbentuk untuk hasil pajak/ untuk hasil bukan pajak, Dana Alokasi Universal serta Dana Alokasi khusus.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk tertulis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data manual dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa hasil informasi dari informan terkait peran inspektorat dalam reviu APBD di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik permasalahan. Observasi dan

wawancara adalah dua teknik pengumpulan data yang digunakan. Reduksi data, data penyajian, and kesimpulan penarikan kesimpulan adalah teknik analisis yang digunakan.

HASIL PEMBAHASAN

1. Mutu sumber energi manusia
Mutu sumber energi manusia yang kurang sanggup dalam perihal uraian SPIP serta penempatan cocok kebutuhan, dan pelatihan, pelatihan serta pembelajaran buat kenaikan kapasitas masih kurang, mengakibatkan pengetahuan SPIP yang kurang. Jumlah orang di pengawas badan agak sedikit sehingga tidak sesuai dengan jumlah item yang diaudit atau jumlah pimpinan yang menyebabkan APBD kehilangan fokus. Ismani dkk mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki kepentingan karyawan dan personel di organisasi. Pengembangan personel adalah proses pendidikan jangka panjang dengan sistematis dan terorganisir, dimana manager mengejar konseptual dan teoritis yang kemudian diimplementasikan dalam pengembangan personel. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk membuat organisasi efisiensi.
2. Anggaran buat Aktivitas Pengawasan
Anggaran dibutuhkan dalam rangka menunjang penerapan tugas secara optimal. Tetapi perihal tersebut belum terealisasi sehingga aktivitas pengawasan di Kabupaten tidak bisa dicoba secara merata. Dalam perihal ini pemerintah butuh lebih mencermati dengan tingkatkan anggaran buat aktivitas pengawasan supaya tugas pengawasan secara totalitas khususnya APBD bisa dilaksanakan secara maksimal guna menggapai tujuan pemerintah.
3. Komitmen
Inspektorat merupakan lembaga pengawasan dalam pemerintahan daerah, memegang peranan yang sangat berarti dan signifikan bagi kemajuan dan keberhasilan pemerintahan dalam menyelenggarakan dan mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Kedudukan serta guna Inspektorat antara lain tugas pemerintah wilayah buat memfasilitasi tiap Satuan Kerja Fitur Wilayah di unit kerjanya tiap- tiap guna menggapai tujuan serta sasaran aktivitas operasionalnya secara efisien serta efektif.
4. Pengawasan Berbasis Risiko
Inspektorat sudah melaksanakan evaluasi resiko serta pemetaan resiko tetapi belum maksimal, hambatan waktu pula menimbulkan perihal tersebut tidak bisa dicoba secara optimal. Perihal ini berakibat pada APBD sehingga pula belum bisa melaksanakan evaluasi resiko serta pemetaan resiko secara maksimal sebab sebagian besar belum mengenali metode melaksanakan evaluasi resiko. Pengawasan berbasis resiko jadi berarti dalam rangka penuhi kedudukan Inspektorat buat membagikan keyakinan yang mencukupi, peringatan dini dan melindungi serta tingkatkan mutu tata kelola.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang diawasi di Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, dan dari segi luas pengawasan merupakan pengendalian intern yang diuji secara fungsional secara internal. Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh aparatur dalam organisasi bersifat fungsional dan ditempatkan sebagai bagian dari lembaga yang diawasi. Sebaliknya, berdasarkan jenis pengawasan yang dilakukan, pengawasan Inspektorat Deli Serdang dapat digolongkan sebagai pengawasan "preventif". Ini menunjukkan bahwa pengawasan preemptive adalah yang terpenting. Menghindari berarti menjaga agar tidak melakukan kesalahan yang sama atau serupa berulang kali. Dalam hal kepemimpinan, pengendalian intern, konsultan, dan penjaminan mutu, peran Inspektorat dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Deli Serdang adalah kepemimpinan, pengendalian intern, konsultan, dan penjaminan mutu. Posisi Inspektorat dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Deli Serdang terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan jumlah pegawai yang tidak mencukupi, kurangnya dana untuk kegiatan pemantauan, dan kurangnya komitmen bersama. Karena keterbatasan waktu, penilaian risiko dan pemetaan risiko belum maksimal dalam pelaksanaan APBD. Upaya Inspektorat untuk meningkatkan pelaksanaan APBD di Kabupaten Deli Serdang antara lain peningkatan kualitas sumber energi dan peningkatan taraf pembelajaran. Belajar dari lembaga seperti pemerintah daerah, meningkatkan anggaran untuk operasi pengawasan, menumbuhkan komitmen bersama terhadap pelaksanaan APBD, menilai risiko secara menyeluruh, serta memetakan dan meningkatkan komunikasi dengan peran inspektorat dalam mengawasi pelaksanaan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Latupeirissa, J. J. P., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Role of Inspectorate to Implementation of The Government Internal Control System (SPIP). *Journal of Humanities, Social Science, Public Administration and Management (HUSOCPUMENT)*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.51715/husocpument.v1i1.2>
- Mardiah, K. dan N. (2020). PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI ASPEK MANAJEMEN DAN MASLAHAH. *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, 15(01).
- Setiawan, H., & Putro, T. S. (2013). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 129–134.
- Suwardi. (2006). ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 319–349.
- Syapsan. (2017). The Influence of the Original Revenue Balance Fund and Regional Income Areas at the Level of Provinces and Regency / City in Indonesia. *International Journal of Finance and Accounting*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20170601.01>